



## PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA GOTONTALO

Fendi Hasan<sup>1\*)</sup>, Melizubaida Mahmud<sup>2)</sup>, Meyko Panigoro<sup>3)</sup>, Roy Hasiru<sup>4</sup>

Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo

Email : [fendihasan1711@gmail.com](mailto:fendihasan1711@gmail.com)

### ABSTRAK

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan variabel penelitian pada aspek pemahaman secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo telah Menerapkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dengan menggunakan Aplikasi SIPD dan ETMIS yang dilakukan secara komputerisasi berjalan dengan baik dan lancar sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan yaitu dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif, tidak hanya capaian realisasi anggaran namun juga data yang dihasilkan merupakan data yang lebih valid sehingga mudah dalam pengambilan keputusan hal ini dengan adanya faktor pendukung yaitu sumber daya manusia yang memadai, teknologi yang memadai serta fasilitas dan perlengkapan yang memadai sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Adapun faktor penghambat yaitu jaringan dan kesalahan input pada penerapan sistem akuntansi instansi ini dapat menghambat suatu pekerjaan pada Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo akan tetapi masalah tersebut langsung di perbaiki pada saat itu juga.

**Kata Kunci** : Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Aplikasi SIPD dan ETMIS

### ABSTRACT

*This research aims to determine how the implementation of institutional accounting systems in the Department of Social Affairs and Community empowerment of Gorontalo City. Meanwhile, data are collected through documentation, observatioan, and interviews involving two key informants. This research employs the qualitative descriptive research method, which describes the research variables in a qualitative understanding. The result indicate that the Department of Social Affairs and Community Empowerment of Gorontalo City has implemented the Institutional Accounting System (SAI) using the computerized SIPD and ETMIS applications that are running smoothly. As a result, the financial reports produced can provide better benefits for stakeholders, both users and financial report examiners, such as providing more comprehensive information. Not only does it show the achievement of budget realization, but the data produced is also more valid, making it easier to make decisions. The work can be completed well with supporting factors such as adequate human resources, technology, and facilities and equipment. In the meantime, the networkand input errors in implementing this institutional accounting system are inhibiting factors which can hinder work at the Department of Social Affairs and Communtiy Empowerment of Gorontalo City. However, these problems were promptly corrected at the time.*

**Keywords:** Institutional Accounting System(SAI). SIPD and ETMIS Application

## **PENDAHULUAN**

Suatu Instansi pada umumnya mempunyai tujuan yaitu memperoleh keuntungan yang maksimal guna mempertahankan kelangsungan hidup suatu instansi dimasa yang akan datang, baik itu instansi swasta maupun pemerintah. Untuk mencapai tujuan suatu instansi maka diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang terampil, terdidik, serta jujur dalam melaksanakan sistem akuntansi instansi dengan baik. Seiring dengan adanya Transparansi dalam sistem pemerintahan yang semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali dalam pengelolaan sistem akuntansi instansi baik swasta maupun pemerintah sangat dibutuhkan hal ini disebabkan semakin meningkat untuk menilai dan membanding suatu entitas dengan entitas lain.

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Pemerintah Daerah berperan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayahnya. Kementerian Sosial menyatakan bahwa banyak bantuan sosial tidak tepat sasaran, data yang dilaporkan sering kali berubah dan tidak diikuti pembaruan secara cepat oleh Dinas Sosial tingkat Kabupaten/Kota. melalui Dinas Sosial Kota Gorontalo mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam meningkatkan kesejahteraan sosial yang salah satunya adalah penynggelaraan bantuan sosial. Berdasarkan Hasil observasi dan wawancara perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Gorontalo dalam penyaluran program Bantuan sosial yaitu dengan koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk mendukung pelaksanaan program Bantuan sosial dengan aparatur setempat akan tetapi Dinas Sosial Kota Gorontalo belum maksimal dalam penyaluran bantuan Sosial sehingga Dinas Sosial Kota Gorontalo belum dapat merealisasikan anggaran belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada tahun anggaran 2021, dikarenakan pada tahun tersebut kota gorontalo dilanda Covid-19. Walaupun demikian, Program Bantuan sosial tetap akan terlaksana sesuai dengan jumlah KPM yang datanya sudah tervalidasi. Perencanaan anggaran program Bantuan sosial ini akan tetap dilakukan Dinas Sosial Kota Gorontalo setiap tahunnya. Adapun Pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Gorontalo Terkait dengan Bantuan Sosial yaitu dengan penggunaan bantuan sosial tersebut, pihak Pemerintah Daerah akan mencatatnya sebagai bahan

laporan pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan sosial. Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan, sementara bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. Terkait dengan penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial tersebut pada tahun anggaran berikutnya, dengan memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 40 dan 41 mengenai monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sosial, SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial kemudian hasil monitoring dan evaluasi tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Gorontalo dalam bantuan sosial yang pertama Pelaporan Penerima bantuan Dinas sosial akan melakukan pelaporan tentang penerima bantuan sosial yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pihak berwenang, kedua Pelaporan Distribusi Bantuan Dinas Sosial akan melakukan pelaporan tentang jumlah dan jenis bantuan sosial yang telah di distribusikan ke masyarakat, ketiga Pelaporan Kondisi Penerima Bantuan Dinas Sosial akan melakukan pemantauan terhadap kondisi penerima bantuan sosial apakah masih membutuhkan bantuan lanjutan atau tidak, yang keempat Pelaporan Keuangan Dinas Sosial akan melakukan pelaporan tentang penggunaan dana bantuan sosial secara terperinci untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat dan transparan. Pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam bantuan sosial sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sistem akuntansi pusat sendiri terdiri dari dua subsistem yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi. SiAP akan

menghasilkan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sedangkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) menghasilkan Pelaporan Posisi Keuangan dan operasi Keuangan pada kementerian Negara/Lembaga. Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan untuk menghasilkan kelayakan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga dengan memproses transaksi keuangan yang meliputi arus uang maupun barang. Khususnya pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Gorontalo dalam menerapkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Dokumen Sumber dan Prosedur Penyusunan laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan tetap mengacu pada sistem akuntansi pemerintah yang meliputi basis Akrrual, dan basis kas, Sistem Pembekuan Berpasangan (*double entry*), serta desentralisasi pelaksanaan akuntansi.

Sistem Akuntansi Instansi merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Salah satu implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang berpengaruh secara signifikan terhadap relevansi informasi adalah faktor kemampuan sumber daya manusia yang menjalankan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Lebih lanjut wilkinson (2000:35) menyatakan bahwa kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem informasi sangat bergantung pada *resources inputs berupa manpower, material, facilities, funds dan data*.

Supeno (2011) mengungkapkan bahwa Sistem Akuntansi Instansi (SAI) merupakan langkah pemerintah dalam membangun sistem aplikasi pengelolaan dana yang ada di instansi pemerintah, guna mendukung tercapainya pengelolaan dana yang efektif, efisien. Pengembangan dan pengaplikasian akuntansi instansi sangat penting sebagai alat untuk melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Sistem akuntansi instansi dirancang untuk memudahkan instansi untuk mempermudah pelaporan keuangan.

Salah satu unit akuntansi yang melaksanakan Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo, dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Gorontalo merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah kementerian lembaga/negara yang menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam penerepan Sistem Akuntansi Instansi pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo sudah berjalan dengan baik, tetapi tidak luput juga dari kendala. Kendala dimaksud berupa pelaksanaan rekonsiliasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dihadapkan dengan beberapa kendala yang terjadi, diantaranya ketidaksesuaian waktu atau keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh satuan kerja, serta terjadi ketidakcocokkan data transaksi laporan keuangan yang diakuntansikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang pada prinsipnya berasal dari dokumen sumber yang sama. Kesalahan penginputan dokumen sumber tersebut disebabkan adanya kemampuan sumber daya manusia yang menjadi petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) kurang memperhatikan penginputan dokumen sumber yang didapat masing masing Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) serta sering terjadinya gangguan Jaringan yang berasal dari pusat atau dalam hal ini Badan Keuangan sehingga dalam proses penyusunan laporan keuangan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sering terjadi keterlambatan.

Dampak yang timbul dari kesalahan pencatatan menyebabkan adanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sehingga tidak jarang satuan kerja sering mendapat sanksi dari pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berupa penundaan penerbitan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh satuan kerja. Selain itu pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo sering terjadi perubahan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang disampaikan kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Elson 1 (UAPPA-E1) hal tersebut disebabkan adanya keterlambatan atas penyampaian Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) dari Pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pusat, dengan adanya keterlambatan tersebut maka laporan

penerapan Sistem Akuntansi Instansi yang sudah dipertanggungjawabkan pada saat Konsolidasi pada tingkat UAPPA-E1 mengalami perubahan.

Mengingat begitu pentingnya Penerapan Sistem Akuntansi Instansi pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo, maka Sistem Akuntansi Instansi yang memadai merupakan hal yang mutlak agar terciptanya pertanggungjawaban suatu sistem yang lebih baik, tanpa adanya Sistem Akuntansi yang baik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo mungkin tidak dapat memproses transaksinya secara jelas, terinci dan terstruktur dan lembaga tersebut mungkin tidak dapat memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipercaya yang diperlukan untuk dijadikan dalam penyusunan laporan keuangan.

Sehingga dalam Menerapkan Sistem Akuntansi Instansi maka diperlukan tenaga staf keuangan yang mampu melakukan pencatatan akuntansi dan mampu menyusun laporan keuangan sehingga pengendalian keuangan pemerintah dapat terlaksanakan sesuai prosedur instansi.

Sejalan dengan perkembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang ketenagakerjaan, kebutuhan akan tenaga kerja yang mempunyai produktivitas tinggi diperlukan bagi semua pihak, baik lembaga swasta maupun instansi pemerintahan. Hal ini disebabkan peran SDM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pekerjaan, dimana SDM yang kompeten merupakan salah satu aset penting bagi lembaga untuk mencapai sasaran yang diinginkan suatu instansi, karena jika Sumber daya Manusia (SDM) tidak kompeten maka suatu instansi akan mengalami kesulitan di masa depan untuk itu yang dibutuhkan instansi adalah Sumber daya manusia yang kompeten agar masalah yang terjadi dapat diselesaikan secepatnya.

Adapun mengenai pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered participatory*, dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (empowering) dapat dikaji menjadi 3 aspek : Pertama Enabling yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang, kedua Empowering yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin

berdaya, ketiga Protecting yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demonstrasi dan pembelajaran social. Meberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*) yang dengan segala keterbatasan belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada.

Pemberdayaan masyarakat menurut (2006:74-75) adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergi mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Proses pemberdayaan tidak terjadi dengan sendirinya tetapi juga dengan keikutsertaan dan partisipasi masyarakat sehingga dapat berdaya guna. Agar pemberdayaan berlangsung dan berhasil tidak hanya diperlukan partisipasi dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi saja, akan tetapi kita harus membangun manusianya supaya mampu menyesuaikan pikiran dan tindakannya dengan perkembangan yang terjadi dan memiliki rasa tanggung jawab serta ikut memelihara hasil-hasil atau upaya yang telah dilaksanakan.

Di negara berkembang, keadaan sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat desa pada umumnya masih kurang menguntungkan untuk penyerapan program-program pemberdayaan. Rendahnya tingkat ekonomi dan inovasi dalam membuat suatu produk menjadi kendala yang mencolok, oleh karena itu pembangunan di negara-negara berkembang terutama menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat, yang kemudian baru dilanjutkan dengan pembangunan diberbagai bidang kehidupan masyarakat.

Salah satu tujuan pemberdayaan dalam rangkan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menggali [potensi yang dimiliki sehingga dengan adanya penerapan sistem akuntansi instansi ini lebih memudahkan masyarakat mengetahui laporan keuangan sehingga dapat melanjutkan pembangunan.

## **METODE PENELITIAN**

Mengacu pada rumusan masalah maka penelitian ini, maka penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang berlandaskan fenomenologis. Fenomenologis adalah fenomena-fenomena yang terjadi atau realita yang ada di lapangan penelitian, yang berkaitan dengan Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.

Dalam memperoleh suatu data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. Teknik Observasi**

Widyoko (2014: 46) berpendapat bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Sugiyono (2014: 145) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologi dan psikologis. Observasi ini dilakukan untuk mengamati Penerapan Sistem Akuntansi Instansi pada dinas sosial dan tenaga kerja kota gorontalo.

### **2. Teknik Wawancara**

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dan dilakukan melalui tatap muka dengan menyiapkan instrumen penelitian dengan memberikan pertanyaan yang jelas dan peneliti mencatatnya

### **3. Teknik Dokumentasi**

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian (Nurdin & Hartati, 2019:201).



Data yang terkumpul baik dari hasil wawancara maupun observasi serta dokumentasi telah dianalisis dengan mengikuti beberapa tahapan berupa:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi Data Menurut Sugiyono (2019), data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.

2. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan Data Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak

3. Display Data

Penyajian Data Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Pada penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. Verifikasi dan Penegasan kesimpulan

Menurut Sugiyono (2019), kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi atau temuan-temuan yang dapat dikemukakan peneliti dalam penelitian ini tentang Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo. Dengan mengacu pada aspek-aspek yang diamati yaitu Bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Instansi dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntansi Instansi. Sesuai dengan indikator yang dipilih oleh peneliti, hal pembahasan maupun fokus penelitiannya.

Keunikan penelitian ini terletak pada sistem yang digunakan Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat karena sistem tersebut lebih detail untuk mengumpulkan atau menyajikan data yang lebih akurat dan terpercaya sehingga mudah dalam pengambilan keputusan terakhir untuk anggaran yang dikeluarkan. dimana dalam penerapan sistem akuntansi instansi pada dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat yang digunakan adalah sistem SIPD dan ETMIS dimana sebelumnya menggunakan sistem SIMDA. sistem tersebut digunakan oleh seluruh instansi yang ada di gorontalo serta penelitian memiliki

manfaat bagi para pemangku kepentingan laporan keuangan serta dapat memberikan wawasan atau informasi baru dari penerapan sistem akuntansi instansi serta penelitian ini dapat dilanjutkan oleh penelitian selanjutnya dan penelitian ini menyajikan faktor-faktor yang lebih detail yang membedakan dari penelitian lainnya.

#### 1. Penerapan Sistem Akuntansi Instansi

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan untuk menghasilkan kelayakan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh kementerian Negara/Lembaga dengan memproses transaksi keuangan yang meliputi arus uang maupun barang.

Dalam mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan (akuntansi) proses akuntansi telah berstandar komputerisasi. Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pegawai sub bagian keuangan dalam mengerjakan proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.

Adapun tahap-tahap dalam proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan, dimulai dari transaksi berupa dokumen-dokumen (bukti pembayaran/sejenisnya) kemudian di perlihatkan kepada bendahara, pencairan dana dari bendahara dimuat kedalam aplikasi SPM (Surat Perintah Membayar), setelah SPMnya jadi dilaporkan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), KPPN mengeluarkan SP2D dasar SP2D itulah dibuat laporan keuangan yang di input kedalam sistem SIPD dan ETMIS Selain itu sub pegawai memiliki kewajiban untuk mengetahui semua aplikasi terkomputerisasi akan tetapi dalam penggunaan komputerisasinya disesuaikan dengan tupoksi mereka masing-masing.

Apabila aplikasi komputerisasi yang berkaitan dengan pelaporan berarti yang menangani pelaporan yang harus tahu mengoperasikan aplikasi akuntansi tersebut. Pegawai lain dapat mengetahuinya namun tidak diharuskan, untuk pekerjaan sudah tertupoksi artinya masing-masing pegawai memiliki tanggung jawab masing-masing.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo, peneliti menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan fokus penelitian yakni, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Gorontalo menggunakan 2 sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yaitu, SIPD (Sistem Informasi Pengelolaan Daerah) dan ETMIS (Financial management Information System) untuk tahun sebelumnya Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo menggunakan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah).

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntansi Instansi

Kesuksesan penerapan sistem akuntansi instansi sangat diperlukan sehingga

suatu instansi pemerintah maupun swasta dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel. Jelas sekali untuk membuat penerapan ini berjalan baik, dibutuhkan proses, kondisi dan faktor-faktor yang dapat membuat penerapan ini berjalan seperti yang diharapkan adapun 2 faktor yang dapat mempengaruhi suatu sistem akuntansi instansi dapat dilihat sebagai berikut :

### a. Faktor Pendukung

Faktor Pendukung mencakup Sumber daya manusia yang memadai, Perlengkapan dan Fasilitas, Teknologi yang memadai, Motivasi Kerja Pegawai, Suasana Kerja Instansi berpengaruh penting dalam Penerapan Sistem Akuntansi Instansi.

### b. Faktor Penghambat

Faktor Penghambat mencakup jaringan yang sering bermasalah dan kesalahan penginputan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kemajuan suatu instansi serta dapat menghambat dalam pengambilan keputusan serta dapat menghasilkan informasi keuangan yang tidak akurat.

## PEMBAHASAN

Dari deskripsi hasil penelitian, Penerapan Sistem Akuntansi Instansi dengan menggunakan Aplikasi SIPD dan ETMIS yang dilakukan secara komputerisasi sudah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tujuan akhirnya adalah pelaporan keuangan.

Dalam Hal Kinerja sistem akuntansi instansi menggunakan aplikasi SIPD dan ETMIS sudah bisa dikategorikan baik karena sudah menyediakan kinerja yang sesuai dengan kebutuhan akuntansi sehingga jarang terjadinya eror pada sistem. Hal tersebut disebabkan oleh adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola sistem tersebut.

Dalam hal informasi merupakan bagian yang sangat penting bagi pengambilan keputusan dan pengendalian keuangan instansi. Informasi yang diterima dari aplikasi SIPD dan ETMIS harus akurat, tepat waktu, dapat diverifikasi, serta relevan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Informasi yang diperoleh dari aplikasi SIPD dan ETMIS harus memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Kualitas informasi sangat dipengaruhi oleh kualitas suatu sistem akuntansi itu sendiri.

Dalam hal ekonomi sistem akuntansi instansi merupakan faktor penting yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas sistem tersebut. Sistem akuntansi yang efisien dapat membantu instansi dalam menghemat biaya dan waktu yang digunakan dalam mengelola keuangan dan menyediakan informasi. Sebaliknya, sistem akuntansi yang tidak efisien dapat mengakibatkan biaya yang tinggi dan waktu terbuang, serta mengurangi efektivitas dalam pengambilan keputusan dan pengendalian keuangan. Oleh karena itu, instansi harus memastikan bahwa sistem akuntansi yang digunakan memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan instansi.

Kemudian dalam hal pengendalian dan keamanan sistem akuntansi instansi merupakan faktor yang sangat penting untuk memastikan akurasi dan integritas informasi keuangan. Tanpa adanya pengendalian dan keamanan yang baik maka suatu sistem akuntansi dapat menjadi rentan terhadap kesalahan atau kecurangan, yang akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang tidak akurat dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu instansi harus memastikan bahwa sistem akuntansi memiliki pengendalian internal dan keamanan yang memadai, seperti pembatasan akses, pemeriksaan ulang, sistem audit. Instansi juga harus memastikan bahwa sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola sistem akuntansi instansi.

Kemudian dalam hal efisiensi (Tenaga Kerja) suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan apabila pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya

yang memadai. Sumber daya manusia adalah aspek penting yang sangat diperlukan untuk menjalankan fungsi entitas dalam mencapai tujuannya. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada salah satu informan yang merupakan bendahara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo menyatakan bahwasannya dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu memahami sistem karena dalam penyusunan laporan keuangan, sistem yang digunakan saling terintegrasi. Sistem yang saling terintegrasi tersebut mengharuskan setiap aplikasi sinkron satu sama lain. Sehingga sumber daya manusia memang harus mampu memahami prosedur dan alurnya. Salah satu faktornya yang memudahkan proses untuk menyusun laporan keuangan melalui aplikasi SIPD dan ETMIS dengan menempatkan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang Pendidikan Ekonomi khususnya akuntansi. Namun tidak menutup kemungkinan bagi sumber daya manusia yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi karena hal ini bisa diupayakan dengan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah ataupun yang diadakan secara internal Dinas Sosial. Tentu saja harus diperkuat dengan sumber daya manusia dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangan yang ada pada Satkernya.

Dalam hal layanan sistem akuntansi instansi salah satu indikator mengenai kepuasan ialah dapat meningkatkan kepercayaan dan kualitas informasi yang disediakan serta membantu instansi dalam membuat keputusan yang tepat. Sebaliknya, sistem akuntansi yang tidak memuaskan dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi serta dapat mempengaruhi kualitas informasi.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dalam menyelenggarakan SAI sudah cukup optimal dalam penyusunan laporan keuangan hanya saja masalah yang sering terjadi pada dinas sosial adalah jaringan. Hal tersebut dapat berdampak negatif bagi satker karena dengan adanya kendala jaringan maka satker akan terlambat dalam penyampaian laporan keuangan pada KPPN. Kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat berdampak buruk bagi kinerja satker tersebut di masa mendatang, karena satker akan mendapatkan sanksi apabila hal itu terjadi.

a. Faktor Pendukung

Dari segi sumber daya manusia pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo sudah dikatakan sangat memadai sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan berkualitas karena sumber daya manusia memegang peran penting dalam Penerapan Sistem Akuntansi Instansi.

Dari segi perlengkapan dan fasilitas pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo sudah sangat memadai, hal ini akan membantu instansi dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab bagian keuangan secara efisien dan efektif. Serta memberikan dampak positif pada kinerja dan sudah sesuai dengan kebutuhan instansi.

Dari segi teknologi pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo sudah sangat memadai hal ini merupakan faktor yang sangat penting terhadap instansi karena jika kurangnya teknologi maka instansi tidak akan memiliki kemajuan.

Dari segi motivasi kerja pegawai bagian keuangan sudah dikatakan memiliki motivasi kerja yang tinggi sehingga informasi yang dihasilkan dapat di percaya serta akurat dan mudah dalam pengambilan keputusan.

Suasana kerja pegawai dalam penerapan sistem akuntansi instansi sangat berpengaruh terhadap kinerja dan akurasi sistem akuntansi tersebut. Oleh karena itu instansi perlu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memotivasi pegawai dalam menyusun laporan keuangan. Kepemimpinan yang efektif, komunikasi yang baik, dan penanganan konflik yang cepat perlu dilakukan untuk menjaga suasana kerja yang harmonis. Hal tersebut terjadi pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo yang memiliki suasana kerja yang kondusif sehingga menghasilkan kualitas sistem akuntansi dan menjaga integritas keuangan instansi secara keseluruhan.

b. Faktor Penghambat

Dalam hal jaringan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo sudah dikatakan baik akan tetapi kadang-kadang jaringan sering bermasalah hal ini dapat menyebabkan dampak negatif pada penerapan sistem akuntansi instansi oleh karena itu instansi harus memastikan bahwa jaringan yang digunakan sudah terjamin keamanannya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan dan perawatan secara berkala serta menggunakan teknologi yang sesuai dan terbaru untuk menjaga keamanan dan stabilitas jaringan.

Dalam hal kesalahan penginputan pada penerapan sistem akuntansi dapat berdampak pada akurasi laporan keuangan dan kinerja instansi

secara keseluruhan akan tetapi jika terjadi kesalahan penginputan maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat kota Gorontalo akan segera diperbaiki sehingga hal tersebut dapat meminimalkan dampak yang timbul oleh kesalahan penginputan serta mempertahankan kepercayaan terhadap pemangku kepentingan informasi laporan keuangan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan serta dilakukan secara komputerisasi yang berjalan dengan baik sehingga informasi mengenai Laporan bisa bermanfaat bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan, yaitu dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif tidak hanya dalam capaian anggaran namun data yang dihasilkan merupakan data yang valid artinya data yang benar-benar menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dan dapat dipakai secara maksimal sesuai karena informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan relevan sehingga sudah memenuhi kriteria tepat waktu dan lengkap dalam pelaporannya sehingga mudah dalam pengambilan keputusan. Namun dalam implementasi sistem akuntansi yang efektif memerlukan sumber daya yang kompeten dalam mengelola sistem tersebut.

Saran saya dalam penerapan sistem akuntansi ini Dalam penerapan sistem akuntansi instansi pada Dinas Sosial sudah cukup baik digunakan akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah penggunaan jaringan sehingga dalam penyusunan laporan keuangan tidak terhambat agar dalam pelaporan keuangan dapat dilaporkan tepat waktu serta dalam upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) diharapkan agar lebih meningkatkan pemberian pendidikan dan pelatihan karena sangat dibutuhkan dalam ketidaksesuaian latar belakang pendidikan tim SAI terutama bagi mereka yang berlatarbelakang non akuntansi.

## DAFTAR PUSTAKA

Afifah, I., & Sopiany, H. M. (2017). "*Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dengan Dengan Menggunakan Aplikasi Saiba Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar*".

- Karima, D. (2021). *"Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang"*.
- Ma'ruf, A. (2020). *"Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Camat Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir"*.
- Munawar, N. (2011). *"Pemberdayaan Masyarakat"*.
- Nabut, B. P., & Sinabutar, R. (2021). JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA ( Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi ). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*,
- Nagara, D. S., & Mulyani, S. (2019). *"Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Diukur Menggunakan Parameter Nice. Jurnal Sikap (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan"*
- Pamungkas, B., & Wardani Latifah, I. (2013). *"Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan Sistem Akuntansi Instansi"*.
- Pertahanan, K., Indonesia, R., Pertahanan, P. M., Jenderal, D., & Pertahanan, K. (2012). *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.*
- Sabloit, D. B., & Suryaningsi. (2021). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus di Pengadilan Militer III-15 Kupang).
- Sholohah, S. A., Sulistyawati, A. I., & Santoso, A. (2019). *"Kualitas laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya"*.
- Supeno, (2011), *"sistem akuntansi instansi dan pelaporan keuangan"*.
- Tri Indah K, A. (2022). *"Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Bimba Aiueo Pondok Aren"*.
- Worung, Y. I., Morasa, J., & Tinangon, J. (2015). *"Analisis Sistem Akuntansi Instansi Pada Kantor Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara"*.
- Yunita Rizki Arvi. (2013). *"Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI Sebagai Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan"*.